AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG TIDAK TERLAKSANA BAGI KREDITOR SEPARATIS

TESIS

Oleh:

Webi Achmad Rivaldi

2202190087

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG TIDAK TERLAKSANA BAGI KREDITOR SEPARATIS

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

Webi Achmad Rivaldi

2202190087

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Webi Achmad Rivaldi

NIM : 2202190087

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul:

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG TIDAK TERLAKSANA BAGI KREDITOR SEPARATIS

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalamreferensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuanyang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karyatugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 Juni 2025

Webi Achmad Rivaldi
NIM: 2202190087

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG TIDAK TERLAKSANA BAGI KREDITOR SEPARATIS

Oleh:

Nama	; Webi Achmad Rivaldi
NIM	: 2202190087
Program Studi	: Magister Hukum
Konsentrasi	: Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertabankan dalam Sidang Tesis guna mencspai galat Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 26 Juni 2025

Menyetujui.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H.
NIP/NIDN:141103/9903002872	NIDN: 0322117104

Ketua	Direktur
Program Studi Hukum Program Magist	Progra m Pascasarjana
Dr. Palfoulo Saragi, S.H., M.H.	Prof. Ir. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA
NIP/NIDN: 191691/0305097105	NIP/NIDN: 001473/0320116402

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 26 Juni 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama	: Webi Achmad Rivaldi
NIM	: 2202190087
Program Studi	: Magister Hukum
Konsentrasi	: Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG TIDAK TERLAKSANA BAGI KREDITOR SEPARATIS**"

oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Webi Achmad Rivaldi
NIM	: 2202190087
Program Studi	: Pascasarjana
Fakultas	: Magister Hukum
Jenis Tugas Akhir	: Thesis
Judul	: Akibat Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Tidak Terlaksana Bagi Kreditor Separatis

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari Dosen Pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dan telah dipublikasi atau yang pernah dan telah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain. Apabila ditemukan suatu kemiripan atau kesamaan, maka kesamaan tersebut adalah kutipan dan akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Nonekslusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia untuk menyimpan, mengalih media atau format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, mengembangkan, menjadikan referensi, dan mempublikasi tugas akhir saya selama dan sepanjang tetap mencantumkan nama saya selaku sebagai penulis atau pencipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, dan integritas akademik, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan dan upaya hukum.

Jakarta, 26 Juni 2025

Webi Achmad Rivaldi
NIM: 2202190087

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu yang direncanakan. Penulisan Tesis ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Adapun judul dari Tesis ini adalah **"Akibat Hukum Dari Tidak Terlaksananya Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Terhadap Kreditor Separatis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst 22 Juli 2020)"**. Penulis sangat menyadari tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sakan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H.., M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Tesis Penulis dan Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing II Tesis Penulis dan Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dosen Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan masukan dan arahan terkait penulisan

penelitian ini.

7. Orang Tua tercinta Bapak Achmad Sumaryono dan Ibu Dewi Sumanti yang selalu memberikan doa dan dukungan lainnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

8. Bapak Hj. Sumarno, S.H., M.H., Kakek yang selalu memberikan nasihat, masukan, dan saran dalam membuat penelitian ini.

9. Setiap dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar, dan Staff Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu setiap dan seluruh rangkaian aktivitas kegiatan akademik selama perkuliahan berlangsung.

10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Hukum Angkatan 2023 Universitas Kristen Indonesia yang secara bersama-sama membantu dengan memberikan semangat untuk dan agar selalu mengikuti proses berjalannya perkuliahan.

11. Untuk semua dan/atau Para Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu-persatu yang turut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, kiranya Tuhan berkenan membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu, dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu hukum di kemudian hari.

Jakarta, 26 Juni 2025

Penulis

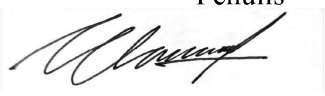

Webi Achmad Rivaldi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR v
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 8
1. Kegunaan Teoritis 8
2. Kegunaan Praktis 8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 9
1. Kerangka Teori. 9
2. Kerangka Konsep 14
F. Metode Penelitian 20
1. Spesifikasi Penelitian 21
2. Metode Pendekatan 22
3. Jenis Data 22
4. Sumber Data 23
5. Analisa Data 24
6. Tehnik Pengumpulan Data 24
7. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian 25
G. Orisinalitas Penelitian 25
H. Rencana Sistematika Penulisan 26
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 28

A. Debitor 28

B. Kreditor 29

C. Utang 33

D. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 35

1. Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 35

2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 42

E. Recana Perdamaian 43

1. Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 43

2. Urgensi Rencana Perdamaian 45

3. Isi Rencana Perdamaian 48

F. Perjanjian Perdamaian 51

G. Konsep Dasar Pembatalan Perdamaian 54

H. Proses Hukum dalam Pembatalan Perdamaian 56

I. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian 57

J. Analisis Teori Hukum Dalam Rencana Perjanjian Perdamaian 59

K. Asas-Asas Hukum 65

1. Asas Kebebasan Berkontrak: 65

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*: 65

3. Asas Itikad Baik (*Good Faith*): 65

4. Asas Proporsionalitas: 66

L. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan 66

M. Analisis Teori Kepastian Hukum Dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian 68

BAB III

PENYEBAB TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN PERDAMAIAN 71

A. Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 71

1. Rencana Perdamaian 71

2. Isi Rencana Perdamaian 76

3. Rencana Perdamaian Yang Disahkan Menjadi Perjanjian Perdamaian Oleh Pengadilan Niaga (homologasi) 82

B. Penyebab Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perdamaian 85

BAB IV

AKIBAT HUKUM DARI TIDAK TERLAKSANANYA PELAKSANAAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TERHADAP KREDITOR SEPARATIS 90

A. Pembatalan Perdamaian Yang Diajukan Oleh PT. Maybank Indonesia, Tbk. Terhadap PT. Nusuno Karya. 97

B. PT. Maybank Indonesia, Tbk., Dapat Mengeksekusi Haknya Seolah-olah Tidak Terjadi Kepailitan. 98

C. Perlindungan dan Akibat Hukum Terhadap Kreditor Separatis Pasca Putusan Pembatalan Perdamaian. 98

D. Kekaburan Hukum Dalam Memperoleh Kepastian Hukum Terhadap Kreditor Separatis Untuk Dapat Mengeksekusi Sendiri Hak Yang Dikuasainya Seolah-olah Tidak Terjadi Kepailitan. ... 102

E. Jangka Waktu Yang Tidak Relevan Bagi Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Sendiri Jaminannya. 105

F. Implikasi Terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Selanjutnya 106

BAB V

PENUTUP 108

A. Kesimpulan 108

B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 110

ABSTRAK

Judul: Akibat Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Tidak Terlaksana Bagi Kreditor Separatis

Latar belakang penelitian ini adalah disebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga mengakibatkan kreditor berdasarkan piutangnya melakukan upaya hukum dengan mengajukan pembatalan perdamaian. Penelitian ini adalah merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan pada peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu dengan menggunakan literatur publikasi, situs website, buku, artikel dan/atau jurnal yang diolah secara kualitatif. Adapun hasil penelitian pertama adalah penyebab tidak terlaksana perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor, karena perjanjian perdamaian yang tidak dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya baik dalam, laporan keuangan, jumlah asset, dan rencana bisnis yang sudah tidak lagi mampu menghasilkan keuntungan, oleh karenanya debitor dan kreditor haruslah menganalisa terlebih dahulu rencana perdamaian sebelum disahkan menjadi perjanjian perdamaian. Hasil penelitian kedua adalah akibat hukum akibat tidak terlaksana perjanjian perdamaian bagi kreditor separatis, dengan tertahannya hak untuk melaksanakan eksekusi pada masa tetap merupakan suatu kekaburan hukum bagi kreditor separatis dalam melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dan jangka waktu yang hanya 2 (dua) bulan dalam mengeksekusi sendiri jaminannya setelah debitor dalam keadaan insolvensi, yang mana jangka waktu tersebut sangatlah tidak relevan dalam bisnis untuk menjual asset jaminan yang nilainya cukup besar, oleh karenanya kreditor separatis haruslah mencari terlebih dahulu pembeli asset yang menjadi jaminan sebelum melakukan upaya pembatalan perjanjian perdamaian

Kata kunci: Tidak Terlaksana, Perjanjian Perdamaian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

ABSTRACT

Title: Legal Consequences of Peace Agreement in the Suspension of Debt Payment Obligations That Are Not Fulfilled for Secured Creditors.

The background of this research is due to the large number of companies that are unable to fulfill their obligations based on peace agreements that have been approved in the postponement of debt payment obligations, resulting in creditors taking legal action based on their receivables by filing for the annulment of the peace agreement. This research is a normative juridical study, which involves approaches to related legal regulations. The data collection technique in this research process is by using secondary data, namely by utilizing literature publications, websites, books, articles, and/or journals that are processed qualitatively. The first research finding is the cause of the failure to implement the peace agreement in the postponement of debt payment obligations by the debtor, due to the peace agreement not being based on the actual circumstances concerning financial statements, asset amounts, and business plans that can no longer generate profit. Therefore, the debtor and creditor must first analyze the peace plan before it is ratified into a peace agreement. The result of the second study is the legal consequences of the failure to implement the peace agreement for secured creditors, where the suspension of the right to execute during the fixed period creates a legal ambiguity for secured creditors in exercising their rights as if bankruptcy did not occur, and the time frame of only 2 (two) months to execute their collateral after the debtor is in a state of insolvency, which is very irrelevant in business to sell collateral assets of considerable value, therefore secured creditors must first seek buyers for the collateral assets before making efforts to annul the peace agreement.

Keywords: Not Implemented, Peace Agreement, Postponement of Debt Payment Obligations